

**UPAYA WAJIB PAJAK DALAM PROSES PEMERIKSAAN
SESUAI PROSEDUR YANG BERLAKU AGAR TIDAK BERLANJUT
PADA PROSES TINDAKAN PENYIDIKAN**

**(STUDI KASUS PUTUSAN NO.19/PIS/SUS/2015/PENGADILAN TINGGI
PEKAN BARU)**

SKRIPSI



OLEH :

ALBERTH LIMANDAU AJIKIN
NPM. 16206002

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA
2021**

**UPAYA WAJIB PAJAK DALAM PROSES PEMERIKSAAN
SESUAI PROSEDUR YANG BERLAKU AGAR TIDAK BERLANJUT
PADA PROSES TINDAKAN PENYIDIKAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NO.19/PIS/SUS/2015/PENGADILAN TINGGI
PEKAN BARU)**

SKRIPSI



OLEH:

ALBERTH LIMANDAU ALIKIN

NPM. 16206002

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA
2021**



**UPAYA WAJIB PAJAK DALAM PROSES PEMERIKSAAN
SESUAI PROSEDUR YANG BERLAKU AGAR TIDAK BERLANJUT
PADA PROSES TINDAKAN PENYIDIKAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NO.19/PIS/SUS/2015/PENGADILAN TINGGI
PEKAN BARU)**

SKRIPSI



OLEH:

ALBERTH LIMANDAU ALIKIN

NPM. 16206002

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA
2021**



HALAMAN PERSETUJUAN
UPAYA WAJIB PAJAK DALAM PROSES PEMERIKSAAN
SESUAI PROSEDUR YANG BERLAKU AGAR TIDAK BERLANJUT
PADA PROSES TINDAKAN PENYIDIKAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NO.19/PIS/SUS/2015/PENGADILAN TINGGI
PEKAN BARU)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Meraih Gelar
Sarjana Hukum

OLEH:

ALBERTH LIMANDAU ALIKIN
NPM. 16206002

Dosen Pembimbing



Dr. Nany Suryawati, S.H., M.H.
NIP. 0110012

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA
2021

HALAMAN PENGESAHAN

**UPAYA WAJIB PAJAK DALAM PROSES PEMERIKSAAN
SESUAI PROSEDUR YANG BERLAKU AGAR TIDAK BERLANJUT
PADA PROSES TINDAKAN PENYIDIKAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NO.19/PIS/SUS/2015/PENGADILAN TINGGI
PEKAN BARU)**

Diajukan oleh:


ALBERTH LIMANDAU ALIKIN
NPM. 16206002

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus pada
Ujian Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Katolik Darma Cendika
Pada tanggal : 2 Februari 2021

TIM PENGUJI:


Ketua

:


Victor Imanuel W. Nalle, S.H., M.H.
NIP. 0110256


Anggota I

:



Dr. Nany Suryawati, S.H., M.H.
NIP. 0110012

Anggota II

:


Retno Dewi Pulung Sari, S.H., M.Si., M.H.
NIP. 0110249

Mengesahkan,
Fakultas Hukum
Universitas Katolik Darma Cendika Dekan,


Dian Ety Mayasari, S.H., M.Hum.
NIP. 0110248



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kehendak-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini terdapat banyak pihak yang mendukung, membimbing, memberi saran, memberi motivasi, serta bantuan terhadap penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan masa depan, kekuatan, hikmat, pengharapan dan cinta yang tiada henti dengan cara yang luar biasa sehingga penulis dapat berada dititik terbaik saat ini untuk meraih mimpi dan cita-cita penulis.
2. Ibu Dr. Nany Suryawati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu, tenaga, pikiran, saran dan perhatian dalam membimbing penulis dari awal penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini.
3. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika yang telah memberikan ilmu dan nilai hidup pada penulis selama perkuliahan dari awal hingga akhir semester.
4. Keluarga penulis yang telah memberikan dukungan baik secara moral, materiil, dan doa yang tak dapat terbalaskan.



5. Keluarga besar fakultas hukum angkatan 2016 selaku teman-teman sekelas penulis di Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika yang selalu memberikan semangat dan mendoakan yang terbaik bagi penulis.
6. Seluruh teman dan pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih untuk segala doa, dukungan, dan bantuan yang diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kekurangan didalamnya. Oleh karena itu, penulis menerima terhadap adanya kritik dan saran untuk penelitian selanjutnya. Kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pendidikan di kemudian hari.

Surabaya, 3 Februari 2021

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka	6
1. Tinjauan Pustaka tentang Perkembangan dan Ruang Lingkupnya Teori Hukum	7
2. Tinjauan Pustaka Tentang Pajak	11
3. Tinjauan Pustaka tentang Faktor yang Menentukan Kepatuhan Wajib Pajak	17
4. Tinjauan Pustaka Tentang Pemeriksaan Sebelum Penyidikan Sesuai KUHAP	23
F. Metode Penelitian	27
1. Jenis Penelitian	27



2.	Bentuk Penelitian	27
3.	Jenis Data dan Bahan Hukum	27
G.	Proses pengumpulan dan analisis data / bahan hukum.....	28
H.	Pertanggungjawaban Sistematis	28
BAB II PROSES PEMERIKSAAN WAJIB PAJAK DALAM		
	PUTUSAN NO.19/PIS/SUS/2015.....	29
A.	Gambaran Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru	29
B.	Proses Pemeriksaan Wajib Pajak dalam Putusan No.19 / PIS / SUS / 2015 Pengadilan Tinggi Pekan Baru	30
C.	Proses Pemeriksaan Wajib Pajak sesuai Undang – Undang Perpajakan	37
BAB III UPAYA BAGI WAJIB PAJAK DALAM PROSES PEMERIKSAAN		
	AGAR TIDAK DILANJUTKAN PADA PROSES PENYIDIKAN .	52
A.	Upaya hukum bagi wajib pajak dalam proses pemeriksaan agar tidak dilanjutkan pada proses tindakan penyidikan	52
B.	Proses Pembetulan Surat Pemberitahuan Terhadap Pelanggaran Pajak	54
C.	Proses Pengungkapan KetidakBenaran Terhadap Pelanggaran Pajak sebelum terbit Produk Hukum	59
D.	Proses Pengungkapan KetidakBenaran Terhadap Pelanggaran Pajak sebelum dilakukan Penyidikan atas Bukti Permulaan	62
E.	Proses Penyidikan Terhadap Pelanggaran Pajak	65
F.	Perbedaan sanksi dari pembetulan SPT hingga pengungkapan	



ketidak benaran.....	82
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



ABSTRAKSI

Skripsi ini membahas tentang Upaya Wajib Pajak Dalam Proses Pemeriksaan Sesuai prosedur yang berlaku agar tidak berlanjut pada proses tindakan penyidikan (studi kasus putusan no.19/pis/sus/2015/pengadilan tinggi pekan baru). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah studi normatif dengan tipe Pendekatan kasus deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, yang mana kasus tersebut telah menjadi penetapan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap. Tiap-tiap warga negara wajib membayar pajak. Hal ini dikarenakan sifat pajak yang memaksa untuk keperluan negara, berdasarkan Undang – Undang Dasar Negara 1945 pada Pasal 23A. Selanjutnya, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) mendefinisikan Pajak sebagai kontribusi wajib warga negara pada negara yang bersifat memaksa berdasar UU, tidak ada imbalan langsung, dipakai untuk kepentingan negara. Belakangan ini Tindak pidana perpajakan semakin banyak pada wajib pajak pribadi dan / atau perusahaan baik dalam usaha kecil maupu yang besar, hal ini disebabkan sistem pemungutan *self assessment* serta kurangnya pengawasan dibidang perpajakan sehingga terjadi kecurangan dibidang perpajakan. Upaya hukum yang dapat dilakukan Wajib Pajak apabila diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) tanpa adanya Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan atau Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah mengajukan permohonan pembatalan SKP. Wajib Pajak baik perseorangan maupun badan dapat mengajukan permohonan pembatalan SKP sebanyak 2 (dua) kali ke Dirjen Pajak, namun apabila permohonan pembatalan SKP dibatalkan maka Wajib Pajak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak.

Kata Kunci : self assessment, sanksi pidana, tindak pidana perpajakan